

Prof. Dr. Lili Romli, M.Si., dkk.

Banten

Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Datang



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BANTEN Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Datang

Prof. Dr. Lili Romli, M.Si., dkk.

Penyunting:

Abdul Malik

Desain Sampul :

Hendry Gunawan

Tata Letak :

Syamsul Hidayat

Proofreader :

Rohman, M.A.

Ukuran :

Hal: 353+xxiv, Uk: 15.5x23 cm

ISBN: 978-623-97772-0-3

Cetakan Pertama:

Oktober 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2021 by ICMI Orwil Banten

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT ICMI ORWIL BANTEN

Sekretariat: JLKaujon Baru No 33, RT 01 RW 013, Kelurahan Serang,

Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten

Telp/Faks: 081294735579/081806231384

Website: www.icmibanten.org

E-mail: icmibanten2018@gmail.com

Daftar Isi

Daftar Isi _____

Kata Pengantar _____

Catatan Editorial _____

BUAH CINTA UNTUK BANTEN

Oleh: Dr. Abdul Malik, M. Si _____

BAGIAN KESATU: POLITIK DAN DEMOKRASI

**INDEKS DEMOKRASI DI BANTEN: MENGGUGAT
PERAN DPRD PROVINSI BANTEN**

Oleh: Prof. Dr. Lili Romli, M. Si. _____

**PERAN POLITIK KIAI DALAM PROSES
PEMBENTUKAN DAN PASCA TERBENTUKNYA
PROVINSI BANTEN; SUATU REFLEKSI**

Oleh: Nurdin Sibaweh, M. Si. _____

**PERAN PESANTREN DI PROVINSI BANTEN DALAM
TRANSMISI CIVIC VALUES**

Oleh: Rohman, M. A. _____

DAS SOLEN VS DAS SEIN KORUPSI DHP DI BANTEN

Oleh: Drs. H. Khatib Mansu _____



**REVITALISASI KESADARAN KRITIS KAUM
INTELEKTUAL DALAM MEWUJUDKAN BANTEN
YANG DEMOKRATIS DAN BERADAB**

Oleh: Dr. Ramadipaman, M.Ed. __88

BAGIAN KEDUA: SEJARAH DAN BUDAYA

**MENEMU KENALI TERBENTUKNYA PROVINSI
BANTEN MELALUI SPIRIT MASA LALU BANTEN**

Oleh: Drs. Tubagus Najib, M.A. __119

**MENGENAL RATU BAGUS BUANG ALIAS SULTAN
ABUN BASSAR MUHAMMAD YUSUF ACHMED ADIL
ARLIK FIDIN**

Oleh: Mufti Ali, Ph.D __136

KESULTANAN BANTEN DAN TAMADDUN ISLAM

Oleh: Dr. Enoep Supriatna, M.Pd. __146

MEMULIAKAN BAHASA SUNDA-BANTEN

Oleh: Oei Abdurroxyid Siddiq, S.Ag. __162

**JASENG DALAM MILENIAL BANTEN: PERGESERAN
DAN DISRUPSI**

Oleh: Dewi Surani, S.S., M.Pd. __170

BAGIAN KETIGA : PEMBANGUNAN DAN EKONOMI

**MELIHAT ARAH PENGEMBANGAN PARIWISATA
BANTEN**

Oleh: Muhammad Arif Kirdiat, S.H. __182



PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI
PROVINSI BANTEN

Oleh: Drs. H. Dedi Mulyadi, M. Si __192

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI BANTEN
MENDONGKRAK SEKTOR EKONOMI DAN WISATA
LOKAL

Oleh: Hj. Ade Muslimat, MM., Ph.D (Cand) __210

E-TOURISM UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI PROVINSI BANTEN

Oleh: Listiawati, ST., M.M. __218

PEMANFAATAN LAHAN DENGAN SISTEM
HIDROPONIK (GREEN HOUSE) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI
PROVINSI BANTEN

Oleh: Euis Amilia, S.P., M.T. __232

PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI BANTEN

Oleh: Afifatul Munawiroh __246

MENINGKATKAN GAIRAH INTENSI
BERWIRAUSAHA PADA KALANGAN MAHASISWA DI
BANTEN; SEBUAH TINJAUAN KRITIS

Oleh: Syamsul Hidayat, SE., MM __260

BISNIS AIR DI BANTEN, ANTARA KEPENTINGAN
EKONOMI DAN BENCANA LINGKUNGAN

Oleh: H. Achmad Rifai, SE., M.M __279



Prof. Dr. Lili Romli, M.Si., dkk.

PERKEMBANGAN UMKM DI BANTEN

Oleh: Iis Solihat, SE., M.Ak. __310

MENUMBUHKAN LITERASI KEWIRAUSAHAAN DI MASA PANDEMI

Oleh: Achmad Rozi El Eroy, SE., M.M., CPA CM __320

BAGIAN KEEMPAT: GAIRAH LITERASI

BERDAYA DENGAN BUKU

Oleh: Atik Ardiansyah, M.I.Kom __332

MILENIAL DAN REGENERASI LITERASI

Oleh: Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum. __342



PERAN POLITIK KIAI DALAM PROSES PEMBENTUKAN DAN PASCA TERBENTUKNYA PROVINSI BANTEN; SUATU REFLEKSI

Oleh: Nurdin Sibaweh, M.Si*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000, Banten telah disahkan dan ditetapkan sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Pembentukan Provinsi Banten merupakan perjalanan panjang rakyat Banten dalam memperjuangkan daerahnya menjadi provinsi. Disebut sebagai perjalanan panjang karena proses perjuangan pembentukan Provinsi Banten sudah dimulai sejak tahun 1960an, di mana pada tahun 1963 para tokoh Banten mulai berkumpul dan mengidentifikasi diri sebagai panitia pembentukan Provinsi Banten (*Mansur, 2001:88*). Pada

* Penulis lahir di Cilegon, menjalani pendidikan dasar dan menengah di Kota Cilegon, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Menyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan strata dua di Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Minat kajian pada bidang budaya, agama dan pemikiran Islam. Dalam perkembangannya, tertarik dan sedang menekuni ilmu komunikasi. Aktif diberbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini sebagai Wakil Ketua ICMI Orda Tangsel dan Ketua HISSI Kota Tangerang Selatan.

fase ini perjuangan pembentukan Provinsi Banten memiliki tantangan ideologis dan politik, mengingat sistem politik saat itu mengacu kepada sistem Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunis), dan para tokoh Banten yang berkumpul serta mengidentifikasi diri tersebut berasal dari berbagai tokoh partai politik saat itu, antara lain Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI), (Mansur, 2001:88). Proses perjuangan pembentukan Provinsi Banten terus berlanjut dengan berbagai dinamikanya, dan sukses pada tahun 2000.

Dalam proses perjuangan pembentukan Provinsi Banten tersebut, semua elemen masyarakat Banten berkontribusi dan bergerak, mulai dari mahasiswa, pemuda, tokoh pemerintahan, Bupati/Walikota se Banten, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Banten, dan tokoh agama seperti para ulama dan Kiai. Proses pembentukan Provinsi Banten, tentu meniscayakan adanya dinamika seperti komunikasi politik, baik oleh para politisi maupun para tokoh di Banten, tak terkecuali adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh para Kiai Banten. Hal ini mengingat kiai di Banten memiliki peranan dan pengaruh yang kuat.

Peranan dan pengaruh kiai dalam masyarakat Islam di Banten sampai kini masih menempati posisi yang strategis, sebagaimana dikemukakan oleh Lili Romli (2020:192) bahwa pada masyarakat yang kental nuansa keagamaannya seperti di Banten, kiai memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sampai saat ini, kiai merupakan salah satu subkelompok sosial yang



memainkan peran penting di masyarakat Banten. Walaupun peran dan kedudukan tradisional mereka terus menerus digerogoti oleh arus modernisasi di mana beberapa kiai mengalami penurunan fungsi dan peran sehingga tidak lagi menjadi “titik sentral” untuk mengatasi problem sosial di masyarakat. Akan tetapi, perubahan-perubahan tersebut tidak sampai menghancurkan semua kedudukan dan peran sosial mereka secara menyeluruh. Kiai tetap merupakan figur yang dihormati oleh masyarakat Banten sampai saat ini. Bahkan dalam perjalanan sejarah, Lili Romli (2020:192) menambahkan bahwa kiai memiliki peran penting, selain sebagai agen perubahan sosial melalui pesantren, ia merupakan benteng kejayaan Islam. Di Banten sendiri, kepemimpinan kiai merupakan salah satu model kepemimpinan tradisional yang memiliki akar sejarah yang panjang dalam masyarakat Banten.

Menurut Muhtadi (2004:39-40), ada beberapa faktor yang membuat kuatnya pengaruh kiai dalam masyarakat. *Pertama*, secara teologis, masyarakat Islam memandang kiai sebagai ahli waris penerus para nabi (*waratsatul anbiya*), sehingga tidak ada figur lain yang bisa menerjemahkan pesan-pesan Tuhan yang termaktub dalam firman-firman-Nya. *Kedua*, adanya karisma yang terbentuk secara alamiah. Oleh karena itu, dengan karisma yang dimilikinya, kiai ditempatkan sebagai pemimpin atau aktor dalam perubahan sosial karena memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat. Bahkan pengaruhnya, tidak hanya sebagai aktor perubahan sosial melainkan juga perubahan politik. Dalam hal ini, Dhofier (1982:56-58)

menyampaikan bahwa kekuatan pengaruh kiai terletak pada dua hal, *pertama*, memiliki perasaan kemasyarakatan yang sangat dalam dan tinggi (*high social developed sense*). *Kedua*, senantiasa melandaskan sesuatu kepada kesepakatan bersama (*consensus*). Dengan dua kekuatan tersebut, menurut Dhofier, menjadi alasan utama penerimaan masyarakat terhadap kiai. Oleh karena itu, peran kiai tidak hanya sebatas dalam masalah keagamaan semata, melainkan lebih dari itu, kiai juga berperan dalam bidang-bidang lainnya, seperti terlibat dalam kelompok *interest group* atau *pressure group*, berperan sebagai juru bicara masyarakat atau sebagai jembatan penghubung dengan kekuasaan sehingga dalam struktur sosial masyarakat desa, kiai dapat juga disebut sebagai *the ruling class*.

Selain itu, Syarif (2018:161) dengan mengutip Dirdjosanjoto menjelaskan bahwa seorang kiai akan selalu dianggap sebagai panutan apabila memiliki syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, wibawa moral yang muncul dari keunggulannya dalam pengetahuan agama, selain itu sosok kiai juga dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual di atas masyarakat secara umum. *Kedua*, selain menjadi pimpinan pesantren, ia juga pemilik lingkungan pesantrennya. Bahkan di kalangan pesantren, kiai memiliki kewibawaan yang hampir bisa dibilang mutlak, dan ia merupakan tokoh yang paling dihormati. *Ketiga*, memiliki jaringan antarkiai, misalnya lewat perkawinan. Umumnya jaringan antarkiai ini terjadi melalui perkawinan yang sifatnya endogamus. *Keempat*, memiliki hubungan dengan

pemerintah dan pusat-pusat kekuasaan di luar. *Kelima*, kualitas pribadinya, seperti penguasaan terhadap hukum Islam dan kitab tertentu, garis keturunan, karisma, ataupun daya tarik yang bersifat pribadi.

Berdasarkan pertimbangan pengaruh dan posisi strategis kiai tersebut, utamanya dalam konteks Banten, penulis memandang penting melakukan kajian mengenai peran dan posisi kiai Banten, dengan memfokuskan pada peran politik kiai Banten dalam proses pembentukan Provinsi Banten sekitar tahun 1999-2000, dan bagaimana peran serta posisi Kiai Banten pasca terbentuknya Banten menjadi provinsi.

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber data dari studi literatur dalam bentuk buku dan jurnal, serta wawancara. Wawancara yang dimaksud dalam hal ini yaitu wawancara pembicaraan informal, dimana pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri dan bergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (Moleong, 2002:135-136).

Peranan Kiai dalam Proses Perjuangan Pembentukan Provinsi Banten

Proses perjuangan pembentukan Provinsi Banten yang diawali sekitar tahun 1960-an, dan berakhir sukses pada tahun 2000 merupakan perjalanan panjang, dan apabila ditelusuri lebih jauh, maka keinginan Banten menjadi Provinsi memiliki latar historis yang kuat. Keinginan pembentukan Provinsi Banten oleh para tokoh

dan masyarakat Banten bukan hanya sekadar keinginan tanpa alasan. Di samping alasan kemiskinan dan kesenjangan, pembentukan Provinsi Banten juga menekankan latar historis mengapa Banten perlu menjadi daerah otonom. Menilik dari perjalanan sejarahnya, Banten merupakan suatu entitas budaya dan peradaban dengan wilayah yang memiliki ragam potensi dan identitas budaya serta keunggulannya. Buku-buku tentang sejarah dan kebudayaan yang ditulis para sejarawan dan budayawan telah banyak menjelaskan mengenai potensi dan khazanah kebudayaan yang dimiliki Banten.

Mengenai Banten, dari sisi nama dan citranya, menurut Claude Guillot (*Guillot, 2011:363*), Banten atau Bantam telah dikenal di Eropa, khususnya dalam kesusastraan Inggris, Perancis dan Belanda pada abad ke-17. Guillot menyebut bahwa reputasi Banten santer di Eropa karena dianggap sebagai pelabuhan utama Nusantara atau ibu kota Pulau Jawa. Guillot menulis bahwa menurut para sastrawan Eropa itu, Banten merupakan kesultanan makmur khas wilayah laut-laut Selatan yang mampu merangsang imajinasi. Beberapa kalangan sastrawan atau seniman Eropa yang disebutkan Guillot (*Guillot, 2011: 386-392*) antara lain Ben Jonson (1572-1637) seorang penulis sandiwara Inggris termasyhur dalam *The Alchemist*-nya, Aphra Behn seorang penulis teater dalam cerpen *The Court of the King of Bantam*-nya, William Congreve (1670-1729) seorang penulis komedi dalam *Love for love*-nya, Abbe Jean-Paul Bignon (1662-1743) seorang penulis buku dalam *Les aventures d'Abdalla*-nya, Madeleine de Gomez seorang



penulis cerpen dalam *La princese de Java*-nya, Onno Zwier van Haren (1713-1779) seorang Sastrawan dalam *Agon, Sulthan van Bantam*-nya, dan Johan Hendrik van Balen (1850-1920) seorang Sastrawan dalam *De page van de sultane; historisch verhaal van den oorlogmet Bantam in 1682*-nya.

Popularitas Banten yang disebut Guillot telah santer disebut dalam kesusastraan Eropa pada abad ke-17 menunjukkan bahwa Banten telah memiliki nama besar sekaligus menunjukkan bahwa Banten telah memiliki entitas budaya dan peradabannya tersendiri sehingga mampu memikat para sastrawan Eropa. Meskipun diakui Guillot, bahwa penyebutan Banten atau Bantam dalam beberapa karya sastra di atas disebutkan hanya selintas atau hanya beberapa kali saja. Namun hal itu sudah cukup menunjukkan ketenaran dan eksistensi Banten dalam peta kewilayahan di dunia.

Dalam buku *Sejarah Banten, Membangun Tradisi dan Peradaban*, yang diterbitkan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, dikemukakan bahwa jauh sebelum abad ke-17, yaitu sekitar tahun 1421 M berdasarkan sumber asing, nama Banten telah dikenal dan disebut-sebut sebagai rute pelayaran (Lubis dkk, 2014:37). Dijelaskan juga berdasarkan sumber asing (Lubis dkk, 2014:37) bahwa dalam laporan perjalanan Tomi Pires (1513) seorang penjelajah ternama, Banten digambarkan sebagai sebuah kota pelabuhan yang ramai dan berada di kawasan Kerajaan Sunda, sehingga kesaksian Tomi Pires ini dapat dijadikan petunjuk bahwa bandar Banten sudah berperan sebelum

berdirinya Kesultanan Banten (1526). Oleh Karena itu, dapat diduga bahwa Banten telah berdiri sekurang-kurangnya pada pertengahan abad kesepuluh atau bahkan abad ke-7. Bahkan Banten yang berada di jalur perdagangan internasional, diduga kuat telah memiliki hubungan dengan dunia luar sejak awal abad Masehi, di mana kemungkinan pada abad ke-7 itu Banten sudah menjadi pelabuhan yang dikunjungi para saudagar dari luar (Lubis dkk, 2014:37). Sampai di sini, apabila melihat sejarahnya, kebesaran nama Banten tidak dapat diragukan lagi, tentu dengan segala dinamika perjalanan sejarah, termasuk penulisan sejarahnya.

Berangkat dari latar historis Banten yang sudah dikenal lama di Eropa dan memiliki sejarah panjang dengan segala kebesaran dan kehebatannya, maka keinginan dan tuntutan Banten menjadi provinsi merupakan hal sangat wajar, meskipun proses untuk mewujudkannya sangat panjang dan berliku. Proses panjang tersebut melibatkan banyak pihak dan kelompok masyarakat di Banten, serta melahirkan banyak dinamika di dalamnya. Dinamika yang terjadi terkait dengan aktivitas atau kegiatan dan langkah-langkah untuk mewujudkan Banten menjadi provinsi, seperti rapat, pertemuan formal dan informal, audiensi, demonstrasi, dan komunikasi politik. Di antara aktivitas atau kegiatan yang patut menjadi perhatian adalah mengenai komunikasi politik yang dilakukan Kiai Banten. Komunikasi tersebut bisa dilakukan ketika pertemuan dengan masyarakat untuk memberikan informasi atau meyakinkan, atau pertemuan secara formal dengan pejabat



pemerintah untuk menyampaikan keinginannya secara langsung.

Sebagai contoh komunikasi secara informal dalam bentuk komunikasi publik, yaitu dilakukan oleh Prof. DR. KH. A. Tihami, sebagai Kiai dan juga Rektor IAIN Serang saat itu, dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat yang menyampaikan antara lain *secara sosial-kultural, masyarakat Banten merasa tidak memiliki keterikatan sosial-kultural dengan Priangan. Hal terpenting ialah, kelompok kiai Banten memiliki kesepakatan bahwa Banten pernah menjadi kerajaan Islam yang besar di Indonesia. Kelompok kiai Banten merasa suatu keharusan untuk membentuk kembali Banten seperti masa lampau yang jaya karena Islami, dan itu bisa terwujud jika Banten bisa menjadi Provinsi (Wawancara Gilang dengan Prof. Dr. KH. A Tihami, dalam Gilang, 2013:5-6).*

Berdasarkan apa yang disampaikan Kiai Tihami tersebut, maka pernyataannya telah menunjukkan kehendak agar Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Pernyataannya tersebut juga menghasilkan sebuah wacana, di mana dengan pernyataannya tersebut terungkap adanya keinginan masyarakat Banten untuk dapat mengelola pemerintahan secara mandiri yang terpisah dari Provinsi Jawa Barat. Pernyataan Kiai Tihami menegaskan adanya usulan untuk membentuk provinsi sendiri dan merupakan sebuah niat yang diarahkan agar pemangku kepentingan memahami keinginan masyarakat Banten untuk membentuk provinsi.

Adapun komunikasi yang secara langsung disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini pejabat pemerintah, yaitu komunikasi KH. Aminuddin Ibrahim, pimpinan Ponpes Terpadu Daarul Iman Pandeglang dalam dua pertemuan: *Pertama*, seminggu sebelum acara halal-bihalal di Pondok Pesantren Daarul Imam, kira-kira akhir Januari tahun 1999, K.H. Aminuddin Ibrahim bertemu dengan beberapa tokoh di Kantor Departemen Koperasi. Pertemuan tersebut melibatkan K.H. Aminuddin Ibrahim, Haji Embay Mulya Syarif, Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid, Profesor Jaffar, dan beberapa pemuda. Ketika pertemuan itu, K.H. Aminuddin Ibrahim *memancing pembicaraan bahwa masyarakat Banten menghendaki pembentukan Provinsi Banten*. Pengajuan pembentukan Provinsi Banten tersebut ditampik oleh Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid dengan alasan sudah mendekati pemilu. Lalu K.H. Aminuddin Ibrahim bertanya solusi yang langsung dijawab oleh Mendagri harus dilempar dulu opini mengenai Pembentukan Provinsi Banten tersebut. Lalu K.H. Aminuddin Ibrahim menanyakan *bagaimana kalau opini tersebut dilempar pada saat kunjungan Presiden ke Pesantren Darul Iman*. Pendapat tersebut langsung diamini oleh Ryaas Rasyid (*Wawancara Gilang dengan K.H. Aminuddin Ibrahim, dalam Gilang, 2013:5*).

Kedua, pada tanggal 5 Februari 1999, sesuai dengan jadwal halal bihalal, rombongan Presiden B.J. Habibie datang ke Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman milik K.H. Aminuddin Ibrahim, di Pandeglang. Pada kunjungan



tersebut, Presiden Habibie ditemani oleh Mensesneg Akbar Tanjung, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, Menteri Agama Malik Fajar, Menteri Koperasi/Pengusaha Kecil dan Menengah Adi Sasono dan Gubernur Jawa Barat Nuriana. Pada pertemuan itu, pemimpin pesantren Daarul Iman Pandeglang, KH. Aminuddin Ibrahim, menyampaikan “usulan agar wilayah eks-Keresidenan Banten dijadikan Provinsi Banten” pada kalimat terakhir sambutannya sebagai tuan rumah. (*hasil wawancara Gilang dengan KH. Aminudin dan KH A Tihami, dalam Gilang, 2013:6*). Pada momen inilah, disampaikan pertama kali oleh KH Aminudin Ibrahim mengenai keinginan masyarakat Banten untuk menjadi provinsi (Gilang, 2013:5-6). Adapun bahasa yang disampaikan dalam acara halal bi halal tersebut oleh KH. Aminudin Ibrahim adalah “Usul Provinsi Banten ini tentu dapat dikaji oleh pakar yang berwenang, karena pertimbangan berbagai potensi, dengan harapan dapat mencapai sasaran peningkatan percepatan pertumbuhan, pembangunan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan” (Mansur, 2001:127). Hal itu disampaikan dalam pidato sambutan, yang selanjutnya dijawab oleh Presiden BJ Habibie: “Silakan, DPRD memperjuangkan aspirasi itu. Pemerintah *welcome* saja. Pelaksanaan pembangunan pada era reformasi saat ini tidak lagi diatur dari atas, *top-down*, tapi harus berasal dari masyarakat, karena pemerintah harus mewakili rakyat”.

Deskripsi di atas, merupakan suatu rangkaian aktivitas proses pembentukan Provinsi Banten, di mana Kiai Banten mengambil peran penting untuk melakukan

komunikasi politik. Hal ini menjadi menarik, mengingat kiai dalam struktur sosial masyarakat Banten menempati posisi yang sangat strategis, bukan hanya berperan pada aspek keagamaan, melainkan lebih jauh lagi dalam aspek sosial kemasyarakatan. Namun dalam hal proses pembentukan Provinsi Banten, penulis berpandangan bahwa Kiai Banten juga berperan melakukan komunikasi politik.

Berdasarkan diskusi awal penulis dengan dua informan, kiai yang berada di Banten banyak terlibat dalam proses pembentukan Provinsi Banten, di antaranya adalah KH. Aminudin Ibrahim (Pimpinan Ponpes Terpadu Daarul Iman Pandeglang), KH. Tb. Rafei Ali (Pimpinan Ponpes An-Nizhomiyyah Jaha Labuan Pandeglang), KH. Tubagus Wasi Abbas Kuncung (Pimpinan Ponpes Alquraniyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten), KH. Karim Syam'un (Ponpes Al-Khairiyah Citangkil Cilegon), Mama KH Yusuf (Pimpinan Ponpes Wasifatul Falah Rangkas Bitung Lebak), KH. Mansur Muhyidin, KH. Uwes Nawawi (Pimpinan Ponpes Tiga Raksa Tangerang), KH. Tb. A Sadzeli Wasi (Pimpinan Ponpes Alquraniyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten). KH Irsyad Djuwaeli (saat itu sebagai Pimpinan PB Mathlaul Anwar), Prof. KH. Wahab Afif, MA (Ketua MUI Banten), dan Prof. DR. KH. A Tihami, MA. Tentu saja masih banyak nama kiai yang terlibat dan masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Penyebutan nama dalam tulisan ini, hanya sebagai contoh sejumlah kiai yang terlibat dan berperan dalam proses pembentukan Provinsi Banten.



Para kiai tersebut terlibat aktif dalam proses pembentukan Provinsi Banten, baik melakukan konsolidasi maupun komunikasi, baik kepada para tokoh Banten, pejabat di Jawa Barat maupun tokoh nasional yang saat itu menjabat, khususnya Mendagri, Mensesneg, Menteri Otonomi Daerah dan Presiden Republik Indonesia. Di era pasca reformasi, Kiai merupakan kelompok masyarakat yang pertama kali mengajukan kembali pembentukan Provinsi Banten (Gilang, 2013:5). Setidaknya ada dua momen utama bagaimana komunikasi kiai dalam upaya pembentukan Provinsi Banten. *Pertama*, momen halal bi halal alim ulama Banten tanggal 5 Februari 1999 di Ponpes Terpadu Daarul Iman Pandeglang, Pimpinan KH. Aminudin Ibrahim. Acara ini dihadiri oleh BJ. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia, dengan di dampingi antara lain Mensesneg Akbar Tanjung, Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto, Menteri Agama Malik Fajar, Menteri Koperasi/Pengusaha Kecil dan Menengah Adi Sasono dan Gubernur Jawa Barat Nuriana. Pada momen inilah, disampaikan pertama kali oleh KH Aminudian Ibrahim mengenai keinginan masyarakat Banten untuk menjadi Provinsi (Gilang, 2013:5-6). *Kedua*, momen kunjungan Presiden RI ke Cilegon tanggal 1 Agustus 1999, dimana saat pertemuan tersebut, Kiai NU yang bernama KH Mansyur Muhyidin menyampaikan kembali keinginan masyarakat Banten untuk menjadi Provinsi (Gilang, 2013:6). Selain kedua momen tersebut, sebelum dan sesudahnya terjadi proses dimana kiai melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Banten menjadi Provinsi, baik

komunikasi diantara kelompok kiai, atau komunikasi kiai dengan masyarakat dan para tokoh.

Peran dan Posisi Politik Kiai Pasca Terbentuknya Provinsi Banten

Dalam sub-bagian di atas, penulis telah mendeskripsikan bagaimana peran kiai dalam pembentukan Provinsi Banten, di mana perannya sangat strategis dan bisa dikatakan sebagai sosok atau tokoh yang menghidupkan kembali semangat dan cita-cita pembentukan Provinsi Banten setelah era reformasi, dimana sebelumnya pada tahun 1960-an telah dimulai beberapa langkah dan gerakan oleh para tokoh Banten untuk membentuk provinsi. Apabila pada bagian sebelumnya, peran politik kiai dalam proses pembentukan Provinsi Banten sangat kuat dan menonjol, maka dalam perjalanan berikutnya, setelah terbentuknya Provinsi Banten, peran politik kiai mengalami beberapa perubahan dan cenderung tergeser oleh kekuatan atau kelompok lain. Hal ini dapat terlihat dari beberapa penelitian mengenai hal tersebut.

Pada sub-bagian ini, penulis mencoba menyajikan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana posisi dan peran politik kiai Banten pasca terbentuknya Banten menjadi provinsi. Hasil penelitian ini disajikan untuk sedikit menghindari subyektifitas penulis. Dalam Penelitian Hamid (2011: 350-252) menunjukkan bahwa pasca era reformasi, tepatnya setelah Banten menjadi provinsi, kekuatan kiai semakin terdominasi oleh kekuatan



jawara. Selain itu peran kiai dalam pembentukan Provinsi Banten juga ikut tenggelam seiring menguatnya dominasi jawara. Hal ini antara lain ditandai dengan penempatan anggota DPRD Banten dan terpilihnya Ratu Atut sebagai anak jawara menjadi Wakil Gubernur Banten pada Pilkada Banten tahun 2011. Bahkan lebih lanjut Hamid menegaskan tentang peran politik kiai Banten di era reformasi dan setelah terbentuknya Banten sebagai provinsi. Menurutnyua, kiai terjebak hanya sebagai penggembira dalam dunia politik dan tidak menjadi penentu utama.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa posisi dan peran kiai pasca terbentuknya Provinsi Banten, tergeser dan kalah dominan oleh jawara. Hal ini, perlu menjadi kajian lebih lanjut, bagaimana idealnya peran dan posisi kiai di Banten untuk saat ini, khususnya dalam konteks politik. Dalam penelitian lain, yang dilakukan oleh Muslim dkk (2015:462) disebutkan bahwa meskipun penampilan jawara secara politik relatif mendominasi, ternyata tidak mengubah kekuasaan sosial ulama atau kiai yang lebih *powerful* dibandingkan dengan jawara, faktor ini terjadi karena masih terjalinnya relasi patron-klien diantara keduanya. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan kondisi antara peran sosial-politik keduanya dengan struktur kekuasaan yang ada. Inilah pertautan kondisi yang sangat unik antara dua kekuatan penguasa religi dan aktor tradisi sebagai karakter dasar dari masyarakat Banten, khususnya masyarakat pedesaan.

Dari penjelasan di atas, dimana terjadinya pergeseran peran politik kiai sebelum dan sesudah

terbentuknya Provinsi Banten, menjadi bahan refleksi untuk membaca dan merumuskan bagaimana peran ideal kiai dalam perjalanan Provinsi Banten ke depan, apakah terlibat dalam politik praktis, atau melakukan peran-peran politik namun tidak terlibat dalam politik praktis, ataukah mengambil posisi untuk tidak terlibat dalam politik, dengan kata lain hanya melakukan pembinaan sosial keagamaan di masyarakat dan pesantren. Dalam konteks ini, Farid (2001:26) menjelaskan bahwa fenomena terjadinya pergeseran peran religius kiai di kalangan masyarakat, pada dasarnya merupakan mata rantai sejarah pergulatan ideologi antar kelompok kepentingan politik yang secara langsung ataupun tidak langsung telah menyentuh kehidupan kiai. Kenyataan bahwa kiai memiliki segmen kepengikutan yang jelas, kini telah diintervensi berbagai kepentingan dengan melibatkan dirinya sebagai sosok yang dapat diperankan untuk memainkan fungsi-fungsi sosial yang sebelumnya tidak pernah disentuhnya. Konsekuensinya, beberapa fungsi sosial keagamaan yang seharusnya diperankan kiai, dalam dinamikanya mulai memudar. Hal ini terutama disebabkan oleh sekurang-kurangnya dua faktor besar. *Pertama*, secara internal, mulai bergesernya interpretasi teologi kiai khususnya berkenaan dengan pemikiran dan aktivitas politik. *Kedua*, secara eksternal, terjadi pula perubahan cara pandang masyarakat terutama berkaitan dengan transendensi kedudukan kiai di tengah-tengah kehidupan mereka.



Kesimpulan

Penjelasan yang telah dikemukakan di atas, mengantarkan suatu kesimpulan bahwa sampai saat ini kiai masih memiliki posisi strategis di Banten. Dalam konteks pembentukan Provinsi Banten, kiai memiliki peran strategis sebagai tokoh dan kelompok yang menghidupkan kembali cita-cita pembentukan Provinsi Banten, serta melakukan langkah-langkah antara lain melalui komunikasi politik, baik kepada masyarakat Banten, elit Banten maupun pejabat di pemerintah pusat. Akan tetap dalam konteks peran politik pasca terbentuknya Provinsi Banten, kekuatan kiai Banten mulai tergeser oleh kekuatan atau kelompok lain, seperti kelompok jawara. Meski demikian, kekuasaan sosial kiai masih dominan atau lebih *powerful* dibandingkan tokoh atau kelompok lainnya.

Kajian ini merupakan pengantar dan sekadar refleksi, di mana ke depan perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai peran ideal kiai Banten dalam proses perjalanan Provinsi Banten ke depan, diantara peran politik dan sosial keagamaan.

Daftar Pustaka

- Dhofier, Zamakhsyari, (1982) *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES
- Farid, Miftah, (2001) *Kiai di antara Peran Agama dan Partisipasi Politik: Dilema Sejarah dan Pencarian Identitas*, dalam *Mimbar Pendidikan*, No. 4/XX.
- Guillot, Claude, (2011) *Banten, Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*, Jakarta: Gramedia
- Hamid, Abdul (2011) *Pergeseran Peran Kiai dalam Politik di Banten Era Orde Baru dan Era Reformasi*, *Jurnal Al Qalam*, Vol 28 No.2. <http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v28i2.895>
- Moleong, Lexy J, DR, MA, (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya
- Mansur, Khatib, Drs, (2001) *Perjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi, Catatan Kesaksian Seorang Wartawan*, Jakarta: Antara Pustaka Utama
- Muslim, Asep, dkk. (2015) *Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten*, *Jurnal Mimbar*, Vol 31 No. 2. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1555>
- Muhtadi, Asep Saeful, (2004) *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama, Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, Jakarta: LP3ES
- Lubis, Nina, dkk. (2014) *Sejarah Banten, Membangun Tradisi dan Peradaban*, Banten: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten
- Romli, Lili, Prof. Dr,M.Si, dkk, (2020) *Kiai, Jawara, dan Modal Sosial, dalam Banten Dalam Ragam Perspektif*, Banten: ICMI Orwil Banten.
- Sukmahavi, Muhamad Gilang, (2013) *Peranan Ulama dalam Pembentukan Provinsi Banten 1999-2000*, FIB Universitas Indonesia.
- Syarif, Juhdi, (2018) *Demi Agama dan Ummat, Perlawanan Abuya Dimyati Terhadap Pelaksanaan Pemilu 1977 di Pandeglang Banten*, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet

Banten

Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Datang

Tahun ini, 2021, Provinsi Banten genap berusia 21 tahun. Jika dikaitkan dengan usia tumbuh kembang manusia, 21 adalah usia yang sedang beranjak dewasa. Belum terlalu matang, baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak. Karenanya, usia 21 masih pula disebut sebagai masa transisi dari remaja akhir ke dewasa awal. Seiring dengan usianya yang telah memasuki dasawarsa kedua, maka tak bisa lagi kita menyebut Banten sebagai provinsi baru, provinsi anak bawang, atau istilah-istilah lain yang menyiratkan situasi 'kanak-kanak' yang tidak hanya meninabobokan lagi melenakan, utamanya bagi pemerintah daerah untuk bekerja semauanya, bekerja tanpa target, lalu kita, masyarakatnya, memberikan permakluman begitu rupa atas kegagalan pembangunan.

ICMI Banten sebagai bagian dari masyarakat Banten, sesuai dengan kapasitas, mencoba memberikan kontribusi dalam bentuk gagasan dan/atau pemikiran. Gagasan dan pemikiran tersebut dituangkan dalam bentuk buku bunga rampai.

Buku Bunga Rampai kedua yang digagas ICMI Banten dihadiahkan sebagai kado ulang tahun Banten yang ke 21. Buku ini adalah cermin kecil dari sikap kritis masyarakat, yang mendamba Banten menjadi provinsi yang lebih baik, lebih lebih maju, lebih hebat, dan lebih dewasa. Karenanya, isi tulisannya pun beragam. Ditulis berdasarkan latar belakang kepakaran, peminatan, dan tentu saja kecintaan para penulisnya terhadap Banten. Ada yang ditulis dengan bahasa yang reflektif, ada yang historik-heroik, bersifat telaah akademik, ada pula yang bersifat praksis.



Penerbit
ICMI Orwil Banten

ISBN 978-623-97772-0-3

